

ISSN : 2303-0429

Publikasi ejournal.ustj-jayapura.com

JURNAL FESSOSPOL JENDELA

VOLUME : 5, No. 1 Januari 2017

ANDI MEGANINGRATNA

Development of Capacity Building Against Illegal Imigran to Minimize Potential Conflvt of Human Security in Makassar

DADANG ILHAM K. MUJIONO, ADE MUSTIKA DEWI BACHTIAR, SUSI IRMAYANTI

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2334: Sebuah Analisis Alasan Amerika Serikat Abstain di bawah Kepemimpinan Presiden Barack Obama

LEWI KABANGA

Maxims Deviation in Conversation Between Domestic Tour Guides and Tourist in Tourisms Spots in Tana Toraja

LINA ANDAYANI, CHARLES M. KORA

Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Entrop Kota Jayapura

RAHMAH DANIAH

Media Massa dan Image Diplomasi di Indonesia

ROSI FITRIYANTI S.

He Role of The Cultural Aspect in Translating English Text into Indonesian Language

VIKTOR AUPARAI

Studi Evaluasi Manajemen Birokrasi Pemerintahan pada Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama



**DITERBITKAN OLEH :
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
FESSOSPOL USTJ - PAPUA 2017**

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA (PBB) NOMOR 2334: SEBUAH ANALISIS ALASAN AMERIKA SERIKAT ABSTAIN DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN BARACK OBAMA

Dadang Ilham K. Mujiono, Ade Mustika Dewi Bachtiar, Susi Irmayanti
Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Mulawarman

ABSTRACT

This research aimed to explain the reason behind United States foreign policy upon abstaining in voting for United Nation Security Council (UNSC) Resolution 2334 on 23rd December 2016. It tried to explain the correlation between US foreign policy, the Resolution 2334 of UNSC and Israel's settlements. The focus of this research is to analyze the reason of US action, which because of this position of US, create resolution number 2334 passes. Furthermore, it is has an impact upon Israel's settlements. In this research, observer is using explanative method to explain the focus of this research. Observer found the datas from the books, documents, journals, and internet browser based on the official website. The outcomes of this research shows that the reason of US abstaining from voting on the Resolution 2334 of UNSC is because US believe that escalation of the settlements building by Israel in Palestine theritory as an increasing threat to the viability of a two-state solution.

Keywords: Resolution 2334, US Abstain, Israel Settlements

PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina sudah tidak asing didengar para penstudi hubungan internasional. Konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel ini sudah berlangsung selama hampir 100 tahun yang lalu dan menjadi konflik yang kompleks sehingga dapat menyita perhatian masyarakat internasional. Konflik ini dimulai pada tahun 1967, di mana Israel menyerang Mesir, Yordania dan Syria dan berhasil merebut Sinai dan Jalur Gaza (Mesir), dataran tinggi Golan (Syria), Tepi Barat dan Yerusalem (Palestina). Pada tahun yang sama Israel kemudian membangun pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem timur (Saidin, 2016: 21). Menurut organisasi hak asasi manusia Betsalem, dari tahun 1967 sampai pertengahan 2013, terdapat 125 pemukiman resmi Israel dan sekitar seratus “pemukiman liar” yang dibangun di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Menurut Badan PBB untuk Bantuan Kemanusiaan *Office for the Coordination of*

Humanitarian Affairs (OCHA), Israel menganeksasi 35% dari luas wilayah Yerusalem Timur dan 63% dari luas wilayah Tepi Barat. Pemimpin Palestina menyakini kebijakan pemukiman Israel telah menghancurkan kesempatan solusi dua-negara dalam hal ini adalah Israel dan Palestina (*two-state solution*) sehingga menyebabkan terhambatnya penyelesaian damai dengan Palestina. Sebanyak hampir 4.000 rumah dibangun secara ilegal di tanah pribadi warga Palestina. Dengan adanya pemukiman ilegal tersebut menambah rumit dan menjadikan konflik 2 negara ini susah mencapai kata damai (ARIJ, 2015: 3).

Berkepanjangannya konflik antara 2 negara ini terkesan karena ada kekuatan besar yang menjadi *backup* dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi sebagian pihak, dalam hal ini Palestina, dan usaha untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, kedekatan Israel dan AS menjadikan Israel sebagai negara yang tidak tersentuh terhadap berbagai macam sanksi, baik yang diberikan oleh masyarakat internasional dan organisasi internasional dalam hal ini adalah PBB.

Kedekatan antara AS dan Israel dimulai dengan hubungan bilateral pada tahun 1948 dimana pada saat itu, AS adalah negara pertama yang memberikan pengakuan kepada Israel sebagai negara yang merdeka (Oren, 2008: 123). Kedekatan AS dan Israel dikarenakan Israel memiliki pandangan yang sama dengan AS yakni menjunjung tinggi kebebasan terlebih lagi Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah dengan sistem pemerintahan demokrasi. Dilihat dari faktor sejarah, kedekatan Israel dan AS juga disebabkan oleh kedua negara ini merupakan negara imigran. Berdasarkan kedekatan tersebut, membuat hampir semua kebijakan yang dirancang di Capitol Hill terkait dengan Israel selalu mendukung keberadaan Israel di wilayahnya. Hal ini terbukti dengan berbagai macam kerjasama yang telah terjalin di antara kedua negara, misalnya pada tahun 1948 tepat setelah kemerdekaan Israel, AS melalui Presiden Truman memberikan bantuan dana sebesar 135 juta dollar AS untuk membantu Israel mengatasi kedatangan ribuan pengungsi Yahudi dari *Holocaust*. Sehingga, dengan adanya kedekatan tersebut menyebabkan AS selalu melindungi Israel terhadap kepentingan yang dia miliki (Oren, 2008: 125).

Namun di masa-masa terakhir kepemimpinan President Barack Obama, kedekatan yang telah terjalin sejak tahun 1948 terganggu dengan sikap abstain pemerintah AS pada sidang DK PBB 2334. Pada tanggal 23 Desember 2016, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melakukan sidang pemungutan suara terkait pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem timur. Dalam pemungutan suara ini dikeluarkan resolusi DKK PBB 2334 yang menuntut Israel segera dan secara menyeluruh menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki negara tersebut. Pemungutan suara itu digelar atas tuntutan empat negara, yaitu Venezuela, Senegal, Selandia Baru, dan Malaysia. Dalam pemungutan suara, 14 negara anggota aktif dan tidak aktif DK PBB menyatakan setuju dengan resolusi DK PBB 2334 ini dan 1 negara abstain. Negara yang abstain dalam sidang pemungutan suara adalah Amerika Serikat. Tindakan Amerika Serikat tersebut menyebabkan resolusi DK PBB 2334 kemudian lolos dimana resolusi ini menyatakan bahwasanya pemukiman yang dibangun Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur itu ilegal. Resolusi DK PBB 2334 lolos dikarenakan Amerika Serikat tidak mem-veto seperti biasanya (Yogendran, 2017: 1).

Sehari setelah pemungutan suara, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengkritik pemerintahan Presiden Barack Obama yang menyatakan abstain dalam pemungutan suara DK PBB 2334. Netanyahu menyatakan bahwa Pemerintahan Obama telah melakukan manuver “licik” dan anti-Israel. Netanyahu menyiratkan bahwa Israel kemungkinan akan memutuskan hubungan dengan PBB dan telah memerintahkan agar aliran dana sebesar 7,8 juta dollar AS dihentikan bagi lima badan PBB yang “sangat bersikap memusuhi” (Yogendran, 2017: 3). Dari sisi Palestina sendiri, mereka menyambut baik resolusi tersebut karena dapat menjadi dasar hukum bagi Palestina untuk melawan pembangunan pemukiman ilegal Israel (Mansour, 2016: 1). Selama delapan tahun kepemimpinan Obama, Presiden Afrika Amerika tersebut selalu menentang segala resolusi yang mengutuk tindakan Israel. Namun berbeda dengan resolusi DK PBB 2334 tersebut, dimana sikap abstain adalah sikap paling “progresif” yang dilakukan AS terkait Israel.

Hal yang menarik, sepanjang sejarah hubungan antara AS dan Israel, pemerintah AS di bawah Barack Obama justru lebih banyak menunjukkan sikap yang erat, dibandingkan dengan suksesor Barack Obama, dimana AS cenderung selalu memberikan teguran kepada Israel atas tindakan – tindakan yang dilakukan (Jilani, 2016). Terkait dengan kedekatan AS dan Israel di era pemerintahan Barack Obama dibuktikan dengan tidak pernah adanya resolusi PBB yang menyudutkan Israel berhasil diloloskan kecuali Resolusi DK PBB 2334.

Dengan adanya sikap AS terhadap Resolusi DK PBB 2334 tersebut tentu menuai banyak pertanyaan terkait motif yang dilakukan oleh AS, dimana seperti yang telah disebut sebelumnya, dengan lolosnya resolusi ini telah membuktikan kepada dunia internasional bahwa adanya pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Israel karena akan berdampak signifikan bagi Israel, terlebih di Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Jalur Gaza.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kualitatif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan kasus – kasus yang berangkat dari hal yang umum dan memiliki kawasan yang luas menuju hal yang bersifat khusus dan spesifik (Catherine, 1994: 4). Lebih lanjut jenis penelitian ini adalah deskriptif dimana akan menjawab pertanyaan mengenai mengapa, siapa, apa, dimana, kapan, atau Bagaimana. Khususnya terkait dengan alasan Pemerintah AS di bawah pemerintahan Barack Obama memutuskan sikap abstain dalam resolusi DK PBB 2334.

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Konflik Palestina-Israel

Dari tahun 1517 sampai 1917 Palestina (yaitu daerah yang sekarang dikenal sebagai Israel, Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yordania) berada di bawah kekuasaan Turki, seperti kebanyakan Timur Tengah. Selama Perang Dunia I diduduki oleh Inggris, yang kemudian diberi mandat di daerah tersebut. Di bawah ketentuan mandat yang disepakati pada tahun 1922 oleh Inggris dan Dewan Liga Bangsa-

Bangsa, Inggris harus memfasilitasi imigrasi Yahudi dan pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Oleh karena ketentuan mandat tersebut maka timbul konflik antara bangsa Palestina dan bangsa Yahudi. Bangsa Palestina menolak kedatangan bangsa Yahudi dikarenakan bangsa Yahudi ingin membangun negara mereka sendiri di tanah Palestina (Lapidoth, 2003: 13). Konflik ini terbukti tidak terselesaikan sampai era globalisasi pada saat sekarang, dimana kecenderungannya, intensitas konflik ini semakin memuncak dan mengorbankan banyak pihak, baik dari pihak Israel dan Palestina.

Dalam rangka menyelesaikan konflik Israel-Palestina diadakan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1947. PBB menegaskan pembagian tanah mandat-Inggris, Palestina kedalam dua negara yang berbeda, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Pertarungan muncul segera setelahnya karena semua negara Arab disekitar wilayah Palestina menolak pembagian tersebut. Semenjak itu, tentara Yahudi mulai melakukan pengusuran bangsa Palestina di wilayahnya hingga menimbulkan banyak korban warga sipil Palestina (POV, 2001: 2).

Mei tahun 1948, para pemimpin Zionis memproklamkan kemerdekaan negara Israel. Pertikaian kemudian terjadi antara negara yang baru dideklarasikan, Israel dan negara-negara Arab disekitarnya ketika pasukan Inggris resmi meninggalkan dan melepas mandat kekuasaannya di tanah Palestina (POV, 2001: 2). Israel kemudian merebut Tepi Barat dan Jerusalem Timur (yang memiliki tempat suci bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi), serta Jalur Gaza dalam perang enam hari ditahun 1967 dan tidak lama kemudian membangun sejumlah pemukiman di ketiga wilayah tersebut (Saidin, 2016: 21).

Pemukiman Yahudi

Dengan diproklamirkannya negara Israel dan berdaulat di atas tanah milik bangsa Palestina, menyebabkan Irsael dengan gencar melakukan pengusuran pemukiman – pemukiman dan penduduk bangsa Palestina. Salah satu penyebab konflik yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut adalah pembangunan pemukiman yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina (Aronson, 2008: 1). Pemukiman Yahudi atau Israel bermula dari berakhirnya perang enam hari pada

tahun 1967. Setahun setelah perang enam hari, beberapa orang Yahudi ortodoks memutuskan untuk tinggal sementara di wilayah Hebron Tepi Barat (*West Bank*) agar jarak yang ditempuh untuk sampai ke Gua Patriakal atau yang disebut juga Gua Makhpela dan Masjid Ibrahim lebih dekat (Muller, 2004: 9).

Berangkat dari situasi tersebut, menyebabkan banyak masyarakat Yahudi mulai berdatangan ke Tepi Barat. Kemudian Pemerintah Israel memfasilitasi mereka dengan membangun pemukiman di tepi Barat dan Yerusalem Timur. Sebagai negara, Israel memiliki Hukum dengan memberikan jaminan bagi semua kaum Yahudi di dunia untuk menjadi warga negara Israel dan berhak untuk tinggal di dalam wilayah negara mereka (Jabareen, 2011: 50). Ini adalah salah satu instrumen politik demografi Israel untuk memperkuat pertahanan wilayahnya.

Menurut Lembaga Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian territory (OCHAoPt), mencatat Sejak 1967 Israel telah membangun sekitar 150 pemukiman di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur (OCHA, 2012: 1). Lebih lanjut, terkait pemukiman terdapat, per tahun 2016 ada 1.618 pemukiman dan 82 pos pengawas yang dikelola Israel di Tepi Barat dan sisanya di Yerusalem Timur (Peace Now, 2017: 15). Jumlahnya semakin bertambah setiap kali Israel mengalami pergantian pemimpin. Bahkan dengan semakin bertambahnya jumlah pemukiman tersebut mendorong tingginya jumlah bangsa Yahudi yang bermukim di wilayah tersebut, terbukti di tahun 2014 terdapat 570.700 orang, di antaranya 370.700 masyarakat tinggal di Tepi Barat dan 200.000 di Yerusalem Timur (BBC Indonesia, 2016).

Berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949, pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem adalah ilegal dan melanggar hukum internasional. Dalam Konvensi Jenewa 1949 disebutkan bahwa negara yang menduduki negara lain dilarang memindahkan warga mereka ke daerah pendudukan tersebut. Berdasarkan Perjanjian Oslo tahun 1993 juga disebutkan bahwa sengketa wilayah "harus diselesaikan dengan negosiasi-bukan didikte pihak lain". Namun negosiasi ini selalu gagal karena Israel terus membangun pemukiman. Akhirnya pada Desember 2016 resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 diloloskan yang bunyinya

menyatakan pemukiman Israel di daerah pendudukan sejak tahun 1967 tidak sah secara hukum dan mengharuskan Israel, berdasarkan resolusi itu, segera menghentikan pembangunan pemukiman (UNSC, 2016: 1).



Gambar 1. Pemukiman Israel

Sumber: (Apakah Isu. 2016)

Resolusi DK PBB 2334 dan Implikasinya

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2334 adalah resolusi yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2016. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1979, DK PBB bisa mengadopsi resolusi yang mengecam kebijakan pemukiman Israel di wilayah Palestina (Hutapea, 2017). Isi dari Resolusi 2334 adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali, bahwa tidak diijinkan untuk mengakuisisi wilayah secara paksa berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949 dan mengingatkan kembali peringatan yang diberikan oleh Mahkamah Internasional pada tanggal 9 Juli 2004,
2. Mengutuk semua tindakan yang ditujukan untuk mengubah komposisi demografi, karakter dan status Wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk di Timur Yerusalem, termasuk, antara lain, pembangunan dan perluasan pemukiman, pemindahan pemukim

- Israel, penyitaan tanah, pembongkaran rumah dan pemindahan warga sipil Palestina, yang melanggar hukum humaniter internasional dan resolusi yang relevan,
3. Mengungkapkan keprihatinan serius bahwa aktivitas permukiman Israel terus mengancam kelangsungan hidup solusi dua negara berdasarkan garis 1967,
 4. Mengingat kewajiban di bawah Quartet Roadmap, didukung oleh resolusi 1515 untuk membekukan Israel dari semua aktivitas permukiman, termasuk “pertumbuhan alami”, dan pembongkaran semua pos permukiman yang didirikan sejak Maret 2001,
 5. Mengingat juga kewajiban dalam peta Quartet’s Roadmap untuk Pasukan Keamanan Otoritas Palestina untuk mempertahankan operasi yang efektif yang bertujuan untuk menghadapi semua pihak yang terlibat dalam teror dan menanggalkan kemampuan teroris, termasuk penyitaan senjata ilegal,
 6. Mengutuk semua tindak kekerasan terhadap warga sipil, termasuk aksi teror, serta semua tindakan provokasi, hasutan dan penghancuran,
 7. Mengulangi visinya tentang sebuah wilayah di mana dua negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dengan damai di dalam batas-batas yang aman dan dikenali (UNSC, 2016: 1).

Setelah disahkannya Resolusi 2334 DK PBB, resolusi ini menggambarkan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem timur adalah ilegal dan telah menjadi sebuah penghambat dalam dialog yang konstruktif untuk mencapai perdamaian. Tekanan ini sebetulnya bukan hal baru bagi masyarakat internasional karena banyak anggota PBB yang sudah menyatakan bahwa permukiman Israel telah melanggar Konvensi Jenewa IV terkait pengelolaan wilayah pendudukan (*rules for administering occupied territory*), (Wisnu, 2017).

Resolusi 2334 dapat digunakan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) untuk membawa para pejabat Israel ke *International Criminal Court* (ICC) di Belanda. Selama ini ICC sulit untuk mengadili karena Israel telah lama berpendapat bahwa Konvensi Jenewa IV—yang melarang negara melakukan

pemindahan sebagian dari populasi sipilnya ke wilayah yang diduduki— tidak berlaku untuk Tepi Barat dengan alasan karena tidak ada kekuasaan yang berdaulat yang diakui memerintah disana sebelum perang 1967. Sebagian besar negara tidak setuju dengan penafsiran Israel tersebut. Dengan Resolusi 2334 itu ICC lebih punya alasan untuk secara formal menolak legalitas pemukiman Yahudi di wilayah yang masih disengketakan (Makovsky, 2016: 1). Begitu juga dengan otoritas Palestina dapat menggunakan Resolusi 2334 untuk membuka pertarungan hukum dilembaga-lembaga Internasional melawan pembangunan permukiman Yahudi, dan sebagai negara yang memiliki hubungan bilateral dengan berbagai negara, Palestina masih bisa meminta dukungan politik Eropa, Rusia dan Tiongkok (Rahman, 2016).

Di luar implikasi hukum, resolusi 2334 dapat menjadi landasan bagi gerakan boikot produk-produk Israel, yaitu sebuah gerakan yang didukung oleh konsumen, para artis, akademisi, atau perusahaan untuk memutus hubungan dengan Israel, terutama produk-produk yang diproduksi di luar Garis Perbatasan Hijau (pagar pemisah sepanjang Tepian Barat).

Alasan Amerika Serikat Abstain Dalam Sidang Pemungutan Suara Resolusi DK PBB 2334

Sikap abstain yang ditunjukkan oleh AS pada Resolusi DK PBB 2334 tersebut tentu menimbulkan banyak pertanyaan, terkait alasan yang dilakukan oleh negara super power tersebut. Adapun beberapa alasan yang dilakukan oleh AS terhadap Resolusi DK PBB 2334 tersebut di antaranya:

1. Penghambat Perdamaian

Jika dianalisis berdasarkan Teori Kebijakan Luar Negeri oleh K.J. Holsti menyimpulkan bahwa eskalasi pembangunan permukiman sebagai ancaman terhadap solusi dua negara (*two-state solution*) yang merupakan upaya penyelesaian damai. Alasan ini dikemukakan langsung oleh Samantha Power, Duta Besar AS untuk PBB, tepat setelah Resolusi DK PBB 2334 lolos. Kebijakan Luar Negeri AS terkait penyelesaian konflik antara Israel-Palestina sangat mendukung penyelesaian damai melalui solusi dua negara. Power mengatakan “AS tidak memveto resolusi tersebut karena

pemerintahan Obama percaya bahwa hal itu mencerminkan keadaan terkait penyelesaian konflik dan tetap sesuai dengan kebijakan AS”.

AS memandang tidak dapat secara bersamaan memperjuangkan perluasan pemukiman Israel dan mencapai solusi dua negara untuk mengakhiri konflik. Kedua negara harus membuat pilihan antara tetap memaksakan permukiman atau perpisahan dengan solusi dua negara dimana kedua negara dapat hidup berdampingan dalam damai (Beaumont, 2016). Sehari sebelum sidang, Presiden Barrack Obama melakukan diskusi dengan Wakil Presiden Joe Biden, Sekretaris Negara John F. Kerry, dan beberapa pejabat tinggi negara lainnya. Keputusan yang akhirnya diambil AS mengizinkan resolusi tersebut diloloskan, daripada menggunakan hak veto untuk memblokirnya, hal ini konsisten dengan kebijakan AS yang sudah ada sebelumnya, yang memang menentang aktivitas permukiman Israel, yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah bahwa aktivitas permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2011, ketika AS terakhir memveto resolusi yang sama. AS prihatin akan terus meningkatnya kekerasan dan memandang bahwa resolusi yang disahkan pada hari Jumat, 23 Desember 2016 telah mencakup keseimbangan yang lebih besar daripada resolusi yang telah terjadi sebelumnya. AS melihat permukiman ini menempatkan kelayakan solusi dua negara menjadi berisiko dan oleh karena itu berpikir bahwa tidak dapat memveto resolusi (Memoli, 2016).

2. Diusulkannya Duta Besar AS untuk Israel oleh Presiden Terpilih Donald Trump

Presiden AS terpilih Donald Trump yang menggantikan Presiden sebelumnya, mengumumkan akan mencalonkan pengacara David Friedman sebagai Duta Besar Amerika untuk Israel pada 15 Desember 2016 (VOA Indonesia, 2016). Pemilihan Friedman sangat bertentangan dengan sikap Obama mengenai status permukiman Yahudi. Perbedaan sikap ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh status Friedman yang seorang aktivis *Zionist Organization of America*. Bila Obama masih bersikap hati-hati

dengan menyebut permukiman tersebut sebagai “penghambat perdamaian” (*obstacles to peace*) dan tidak menyebutnya ilegal, pandangan Friedman justru bertolak belakang yang sangat mendukung pembangunan permukiman di tanah Palestina. Resolusi 2334 ini dapat dikatakan sebagai pukulan perpisahan Obama kepada Trump, yang sadar bahwa kebijakannya yang terkait dengan penjajahan Israel di Palestina akan dirombak habis begitu Trump resmi dilantik sebagai presiden.

Selain dukungan terhadap perluasan permukiman Israel di tanah Palestina, Friedman juga dipercaya akan melakukan banyak perubahan kebijakan di Timur Tengah. Trump menjamin bahwa melalui Friedman hubungan AS dan Israel akan semakin erat, dimana yang menarik adalah pada saat penunjukkan Friedman, Trump mengatakan akan memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke Yerusalem, dimana pada saat ini, Palestina menganggap Yerusalem merupakan bagian dari pada teritori yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya rencana AS memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, tentu akan menambah keruh suasana yang terjadi di wilayah tersebut (Zanotti, 2017: 9).

3. Dukungan Masyarakat Internasional

Jika mengacu pada teori konstruktivis, maka kebijakan yang diambil oleh sebuah entitas, baik itu yang berdaulat secara *defacto* dan *dejure* seperti negara dan kelompok – kelompok organisasi internasional, maka kebijakan tersebut berangkat dari fenomena yang memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan masyarakat secara global dalam menghadapi berbagai kondisi. Dalam hal ini konstruktivis memandang tindakan yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional juga berdasar pada norma – norma yang berlaku. Terkait dengan kasus ini, maka norma – norma yang dianut oleh aktor HI tadi adalah norma hukum dan perdamaian internasional. Masyarakat internasional menganggap bahwa apa yang telah terjadi Yerusalem sudah mengganggu prinsip – prinsip perdamaian internasional. Dimana dengan adanya pembangunan permukiman Israel secara ilegal, dan diperburuk dengan sikap sombongnya Israel yakni tidak mengakui Konvensi

Jenewa terkait pemukiman ilegal tersebut, maka aktor – aktor HI merasa wajib untuk bertindak dalam upaya mereduksi permasalahan yang terjadi.

Maka, tindakan yang dilakukan oleh aktor HI, pertama dilakukan oleh Mesir atas nama Palestina. Namun tidak berlangsung dengan lama, Mesir menarik kembali teks resolusi tersebut setelah Perdana Menteri Israel Netanyahu memberi tekanan pada Presiden Mesir Abdel Fatah Al-Sisi. Dia juga melobi politisi AS, termasuk presiden terpilih Donald Trump dan timnya, untuk memveto resolusi tersebut. Keesokan harinya, sebuah resolusi baru ditulis oleh Selandia Baru, Malaysia, Venezuela dan Senegal yang juga mengajukan resolusi serupa ke PBB (Yogendran, 2017: 2).

Tidak hanya berhenti sampai disitu, Uni Eropa sebagai organisasi regional sejalan dengan apa yang telah dilakukan PBB dan AS yakni mendukung Resolusi 2334. Sudah sejak lama Uni Eropa mengecam pembangunan permukiman Israel di Tanah Palestina. Uni Eropa mengecam Israel karena membangun lebih dari ribuan rumah ilegal di tanah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur (Aquadini, 2017) pada tanggal 8 Februari 2017, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan undang-undang tentang pengesahan permukiman oleh pemerintah Israel jika diterapkan akan berbahaya dan melanggar hukum internasional.

Pembangunan permukiman akan menghambat perdamaian dan mengancam masa depan penyelesaian kedua negara yang tengah berkonflik. Sehingga Mogherini menegaskan, bagi Uni Eropa, permukiman Israel di wilayah Palestina adalah ilegal (VOA Indonesia, 2015) Uni Eropa mengecam permukiman Israel salah satunya dengan membuat kebijakan produk Israel asal Tepi Barat, Gaza, dan Jerusalem tidak boleh dilabeli “made in Israel”, melainkan mewajibkan produk tersebut diberi label “west bank settlement product” (Lane, 2012: 7).



Gambar 2. Produk Kurma Israel yang dilabeli “Israeli Settlement Produce”

Sumber: (Middle East Monitor/BoycottIsrael.org.u)

Pedoman yang dirancang Uni Eropa mengharuskan para produsen Israel mencantumkan dengan jelas pada label produk pertanian dan produk-produk lain yang dijual di negara-negara Uni Eropa. Seperti produk Israel yang dibuat di Tepi Barat harus dilabeli “*West Bank Israeli Settlement Products*”. Dasar pemikiran di balik itu adalah pengakuan bahwa produk tersebut dihasilkan di daerah jajahan Israel. Kebijakan pelabelan khusus produk Israel asal Tepi Barat, Gaza, dan Jerusalem sudah diterapkan Uni Eropa semenjak tahun 2015 bahkan sebelum Resolusi 2334 diloloskan.

4. Kekalahan Partai Demokrat dalam Pilpres AS, dan Kepentingan AS di Timur Tengah

Selain alasan – alasan yang ditinjau dari segi kebijakan luar negeri dan konstuktivisme, juga terdapat alasan politik yang memang terkesan mengarah kepada kepentingan –kepentingan tertentu dan politik “balas dendam”. Hal ini dibuktikan dengan pasca terpilihnya kandidat presiden dari Partai Republik yakni Donald John Trump mengalahkan partai Demokrat yang mengusung Hillary Rodham Clinton. Menangnya partai Republik membuat Barrack Obama yang mendukung partai Demokrat menjadi khawatir terkait kebijakan AS di Timur Tengah khususnya konflik antara

Israel dan Palestina. Presiden terpilih Donald Trump dalam pidato-pidatonya telah mengatakan beberapa rencana kebijakan yang lebih menguntungkan Israel (Zanotti, 2017: 9). Salah satunya mendukung pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina, padahal Obama telah menyampaikan kritik bahwa permukiman tersebut sebagai penghambat perdamaian Israel-Palestina.

Hal ini tentu menjadi poin penting dalam penanganan permasalahan yang melibatkan Palestina dan Israel dikemudian hari. Sebagai presiden, Barack Obama tentu telah menimbang – nimbang konsekuensi dari adanya resolusi tersebut bagi kepentingan AS secara global. Salah satu poin penting dalam menjaga kepentingan tersebut adalah menjaga dan menjamin seluruh warga negara AS dimanapun berada tetap aman. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat AS yang tersebar di berbagai belahan dunia dengan berbagai macam tujuan dan pekerjaan yang dilakukan tentu merasa tidak aman dengan berbagai kebijakan AS yang selalu “menggempur” dan melakukan perang di kawasan Timur Tengah. Dengan abstainnya AS pada pemungutan suara tersebut tentu akan memberikan signal kepada dunia internasional, khususnya kawasan timur tengah, bahwa AS sebagai negara yang memegang teguh demokrasi dan menjaga hak – hak manusia, peduli akan perdamaian di Timur Tengah, sehingga secara tidak langsung dampak yang akan dirasakan bagi warga AS yang bermukim di kawasan tersebut akan berbeda jika pemerintah AS menolak resolusi tersebut.

Harus diingat, bahwa Timur Tengah, sekalipun berada pada titik kritis disaat sekarang, namun ketika segenap masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut diajak untuk menentukan pilihan membantu rakyat palestina, tentu mayoritas akan membantu Palestina dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya. Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh faktor kesamaan agama dan sejarah nenek moyang mereka.

Sehingga AS, sebagai negara yang memiliki kepentingan yang sangat besar di Timur Tengah, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan energi,

tentu merasa punya kewajiban dalam mendukung dan menjaga perdamaian di kawasan timur tengah tersebut, terbukti dengan ungkapan Barack Obama di berbagai kesempatan, bahwa pembangunan kawasan pemukiman di Yerusalem tersebut adalah merupakan “*obstacle to peace*”.

KESIMPULAN

Lolosnya resolusi DK PBB 2334 menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur ilegal. Dengan adanya dasar Resolusi DK PBB tersebut membuat banyak masyarakat ataupun lembaga – lembaga yang berkepentingan menjadikan resolusi tersebut sebagai alat untuk mengancam dan menyudutkan serta memaksa Israel untuk berhenti dalam membangun pemukiman di wilayah yang dianeksasi tersebut. Lebih lanjut, keputusan abstain AS terhadap pada saat voting resolusi tersebut didasari oleh berbagai faktor, di antaranya: (1). Penghambat perdamaian. (2). Diusulkannya / Dipilihnya Duta Besar AS untuk Israel oleh Presiden terpilih Donald Trump. (3). Dukungan Masyarakat internasional 4. Kekalahan Partai Demokrat dalam Pilpres AS dan menjaga kepentingan AS di Timur Tengah.

DAFTAR PUSAKA

- Ani W. Soetjipto (ed). (2015). *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Catherine Cassell and Gillian Symon (eds). (1994). *Qualitative Methods in Organizational Research*, London, Sage Publications
- Holsti, K.J. (1998). *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis*. (diterjemakan oleh M. Tahir Azhari.), Edisi ke-IV, Jilid ke I. Jakarta: Erlangga
- Jabareen, Yousef Taiseer. *Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People*. 2011
- Lapidoth, Ruth. *Israel and the Palestinians: Some Legal Issues*. The JUS Studies Series No. 94. 2003
- Makovsky, David. *Early Implications of the UN Settlements Resolution*. The Washington Institute for Near East Policy. Desember 2016
- Mansour, Riyad. *Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations*. 2016

- Mas'ood, Mochtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- Muller, Patrick. *Occupation In Hebron*. A publication of the Alternative Information Center. 2004
- OCHA. OCHA - occupied Palestinian territory (oPt). *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)*. 2012
- Paul R. Viotti dan Mark V. Kaupi. (2010). *International Relations Theory: 4th edition*. New York: Longman Pearson
- Peace Now. *Peace Now's Annual Settlement Construction Report 2016: Stark increase in Settlement Construction*. Settlement Watch. 2017
- POV. *History of The Israeli-Palestinian Conflict*. American Documentary, Inc. 2001
- Saidin, M. Irwan S., Mujani, Wan K., M. Mazuki, Azyati A. *Perang Enam Hari Arab Israel 1967 Menerusi Perspektif Teori Realisme*. International Journal of Islamic Thought. 2016
- Sugiyarto Pramono & Andi Purwono (2010). *Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- The Israeli Settlement Enterprise and its Impacts on the Two-State Solution. *Applied Research Institute – Jerusalem*. September 2015

Sumber Internet

- Apakah Isu Pemukiman Yahudi bisa diselesaikan dalam Konflik Israel-Palestina?*. 2016. tersedia di <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38471185>
- Aquadini, Sita Planasari. *PBB dan Uni Eropa Kecam Pengesahan Pemukiman Israel*. 2017 tersedia di <https://m.tempo.co/read/news/2017/02/08/115844146/pbb-dan-uni-eropa-kecam-pengesahan-pemukiman-israel>.
- Aronson, Geoffrey. *Report On Israeli Settlement In The Occupied Territories*. 2008. tersedia di <http://fmep.org/wp/wp-content/uploads/2015/01/18.6.pdf>
- B. Oren, Michael. *Israel and the United States: The Special Bond Between Two Nations and Two Peoples*. 2008. Tersedia di mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Israel60/ch10.pdf
- Beaumont, Peter. *US abstention allows UN to demand end to Israeli settlements*. 2016. Tersedia di <https://www.theguardian.com/world/2016/dec/23/us-abstention-allows-un-to-demand-end-to-israeli-settlements>
- Hutapea, Rita Uli. *Dubes As Berjanji Tak Akan Biarkan Israel diserang di PBB*. 2017. tersedia di <https://news.detik.com/internasional/3458547/dubes-as-berjanji-tak-akan-biarkan-israel-diserang-di-pbb>
- Jilani, Zaid. *Obama Allows Toothless UN Resolution Against Israeli Settlement To Pass*. 2016. tersedia di <https://theintercept.com/2016/12/23/obama-allows-toothless-un-resolution-against-israeli-settlements-to-pass/>
- Lane, Andrew. *EU Trade with Israeli Settlements*. 2012. Tersedia di [http://www.qcea.org/wp-content/uploads/2012/08/bp-eusettlementtrade version2-en-aug-2012.pdf](http://www.qcea.org/wp-content/uploads/2012/08/bp-eusettlementtrade%20version2-en-aug-2012.pdf)

- Memoli, Michael A. *Obama personally authorized U.S. abstention from U.N. vote on Israeli settlements*. 2016. tersedia di <http://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-trailguide-updates-obama-authorized-u-s-abstention-on-1482528162-htmlstory.html>
- Rahman, Mustafa Abd. *Manuver Obama dan Resolusi DK PBB*. 2016. tersedia di <https://kompas.id/baca/internasional/2016/12/30/manuver-obama-dan-resolusi-dk-pbb/>
- Siregar, Basfin. *Pukulan Perpindahan Buat Trump*. 2017. tersedia di <http://arsip.gatra.com/1622-07-05/majalah/artikel.php?pil=23&id=163615>
- Trump Tunjuk Dubes untuk Israel, Berencana Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem*. 2016. tersedia di <https://www.voaindonesia.com/a/trump-tunjuk-dubesuntukisrael/363874.html>
- Uni Eropa Setujui Pencantuman Label untuk Produk dari Pemukiman Israel*. 2015. tersedia di <http://www.voaindonesia.com/a/uni-eropa-setujui-pencantuman-label-untuk-produk-dari-pemukiman-israel/3053109.html>
- UNSC. *Resolution 2334*. United Nations Security Council, S/RES/2334. 2016.
- Wisnu, Dinna. *Resolusi 2334*. 2017. tersedia di <http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=2&date=2017-01-18?r=0&n=2&date=2017-01-18>
- Yogendran, Sangeetha. *The Politics of Legality and UN Resolution 2334*. 2017. tersedia di <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/01/CO17015.pdf>
- Zanotti, Jim. *Israel: Background and U.S. Relations in Brief*. 2017. tersedia di <https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44245.pdf>